

Judul : DPR Kritik Kebijakan Kendaraan Listrik
Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Tantangan Indonesia dalam Transisi Energi

- 1 Rendahnya persentase penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik di Tanah Air, yakni baru sekitar 4%-6%.
- 2 Ketersediaan dana yang diperlukan untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan yang diperkirakan mencapai Rp3.799 triliun.
- 3 Kebijakan Uni Eropa tentang pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan tidak ramah lingkungan atau non-green.

Kritik Jusuf Kalla

- Program kendaraan listrik menyumbang polusi udara melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- Kebijakan kendaraan listrik harus diselaraskan dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mengurangi polusi udara.
- Ekosistem kendaraan listrik harus dikuasai tenaga kerja dalam negeri.

Mamfaat Penggunaan Kendaraan Listrik

- Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Mengurangi impor BBM.
- Mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida.

Sumber: ESDMSapriadi, Bang M

DPR Kritik Kebijakan Kendaraan Listrik

DEWAN Perwakilan Rakyat menyoro- ti serangkaian kebijakan mobil listrik yang dijalankan pemerintah. Kebijakan itu dinilai hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir kalangan.

Kritik mengenai kebijakan mobil listrik itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, kemarin.

Dari Fraksi PDIP, misalnya, menyoro ti ihwal intervensi pemerintah yang cukup kuat pada kebijakan mobil listrik. Padahal, sektor-sektor strategis lainnya juga membutuhkan campur tangan yang lebih dari pengambil kebijakan.

"Intervensi pemerintah itu jangan hanya mobil listrik saja, tapi juga sektor kerakyatan," kata juru bicara Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mena- gi dan mendorong pemerintah un- tuk memantapkan prinsip *spending better* pada belanja.

Juru bicara Fraksi NasDem Fauzi H Amro mendorong agar uang ne- gara dibelanjakan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menekan kemiskinan, dan memacu produk- tivitas sektor pertanian.

"Efektivitas belanja pemerintah diharapkan untuk membangun pe- merataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi

untuk kepentingan kendaraan lis- trik," jelas Fauzi.

Kritik juga disampaikan oleh Fraksi PKS terkait kebijakan insentif kenda- raan listrik. Juru bicara Fraksi PKS Andi Akmal Pasuuddin menyatakan insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan peme- rintah kepada golongan masyarakat kelas atas.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla meng- ingatkan bahwa kebijakan kenda- raan listrik harus didukung dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai pengganti pem- bangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU, itu hanya pindah emisi dari knal-

pot mobil ke cerobong PLTU," ujar Kalla.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresi- denan Moeldoko menegaskan pe- merintah melakukan percepatan pengembangan transportasi bersih berbasis listrik untuk mendorong target *net zero emission* atau nol emisi karbon. Itu merupakan kondisi ketika semua gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia dihilangkan dengan menyerapnya kembali hingga mencapai level yang seimbang.

"Kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dan roda empat merupakan bentuk komitmen pemerintah mewu- judkan *net zero emission*," katanya. (Mir/Bob/Ind/X-5)